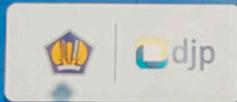




djp



Kantor
Pajak
PALU



CEPAT J
LAPOR
HARI
08235-33



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah-Nya KPP Pratama Palu secara double hatrnick atau selama enam tahun berturut-turut berhasil mencapai penerimaan pajak lebih dari 100%. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam proses pencapaian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara beserta jajarannya atas segala dukungan dan bimbingannya yang diberikan selama ini.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Pratama Palu sebagai unit kerja mandiri mempunyai kewajiban menyusun, menetapkan, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Sehubungan dengan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada KPP Pratama Palu, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pencapaian yang telah diraih oleh KPP Pratama Palu sampai dengan saat ini sejalan dengan semangat moto kami yang diambil dari bahasa daerah Kota Palu yaitu bahasa Kaili "**Mosintuvu Mokaraja, Mohasele Mosinggani**" yang mempunyai arti "**Kompak Bekerja, Berjaya Bersama**". Berdasar dari salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu **sinergi**, moto tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan yang telah diraih KPP Pratama Palu merupakan hasil dari kerja sama dan kerja keras seluruh pegawai KPP Pratama Palu tanpa terkecuali. Dalam perjalanannya, tentu selalu ada tantangan saat kami menjalankan setiap tugas dan fungsi yang ada, terlebih dengan adanya musibah gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 silam. Tetapi semua itu menjadi momentum titik balik bagi kami untuk terus mengukir prestasi dan tetap memberikan pelayanan optimal kepada Wajib Pajak dan tentunya tidak menyurutkan semangat dari seluruh pegawai KPP Pratama Palu. Bahkan semangat itu akan tetap ada dan kami akan terus bersama untuk membawa KPP Pratama Palu menjadi yang terbaik.

KPP Pratama Palu sangat bersyukur dan berbahagia atas segala pencapaian yang telah diraih. KPP Pratama Palu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dengan terus menciptakan dan memperbarui inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas pegawai dan memberikan banyak kemudahan bagi Wajib Pajak. Dalam upaya tersebut, kami akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan kreativitas sehingga dapat menemukan inovasi dalam proses bisnis dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan selalu bertekad mengubah kendala yang datang menjadi tantangan untuk mengukir prestasi.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LAKIN) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) ini seakurat mungkin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palu



Ditandatangani secara elektronik
Mulyana





DAFTAR ISI

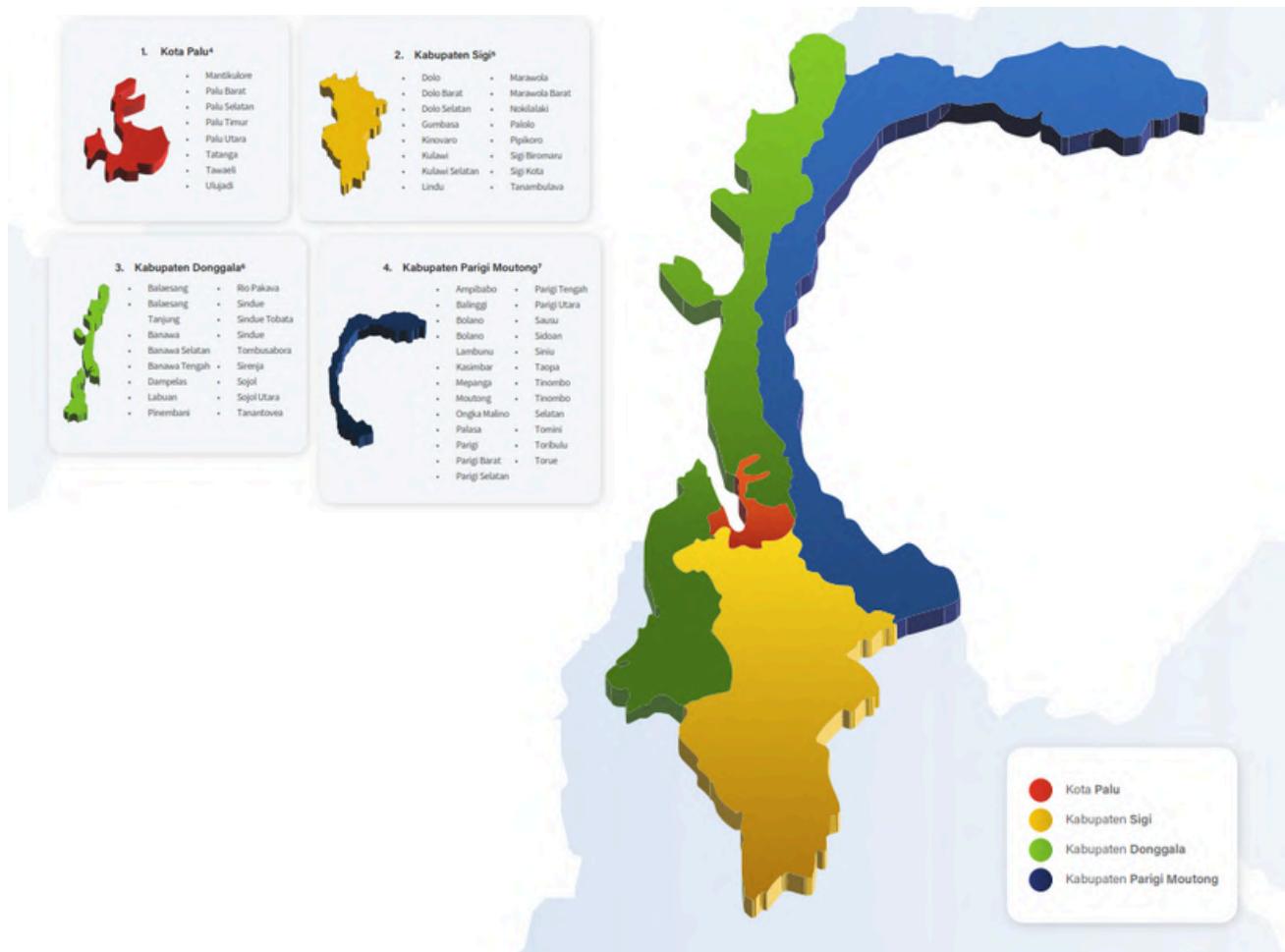
- 3** **Kata Pengantar**
- 4** **Daftar Isi**
- 01**
Pendahuluan
- 6** Wilayah Kerja
- 7** Tugas dan Fungsi Organisasi
- 8** Struktur Organisasi
- 11** Peran Strategis
- 12** Sumber Daya yang Dimiliki
- 15** Sistematika Pelaporan
- 02**
Perencanaan Kinerja
- 17** Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak
- 18** Visi, Misi, dan Moto KPP Pratama Palu
- 19** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
- 03**
Akuntabilitas Kinerja
- 21** Capaian Kinerja Organisasi
 - 24** Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - 35** Kinerja Lainnya
- 37** Realisasi Anggaran
- 04**
Penutup
- 05**
Lampiran





WILAYAH KERJA

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu merupakan unit vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan wilayah kerja terdiri dari **1 kota** dan **3 kabupaten**, yaitu **Kota Palu**, **Kabupaten Sigi**, **Kabupaten Donggala**, dan **Kabupaten Parigi Moutong** yang terbagi menjadi **62 kecamatan**. Untuk menangani keempat wilayah kerja tersebut, dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Palu juga dibantu oleh **2 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan**, yaitu **KP2KP Banawa** dan **KP2KP Parigi**. KP2KP Banawa berlokasi di dalam Kompleks Perkantoran Banawa di Jalan Eboni, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang bertugas membawahi seluruh wilayah Kabupaten Donggala. KP2KP Parigi berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang bertugas membawahi seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.





TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

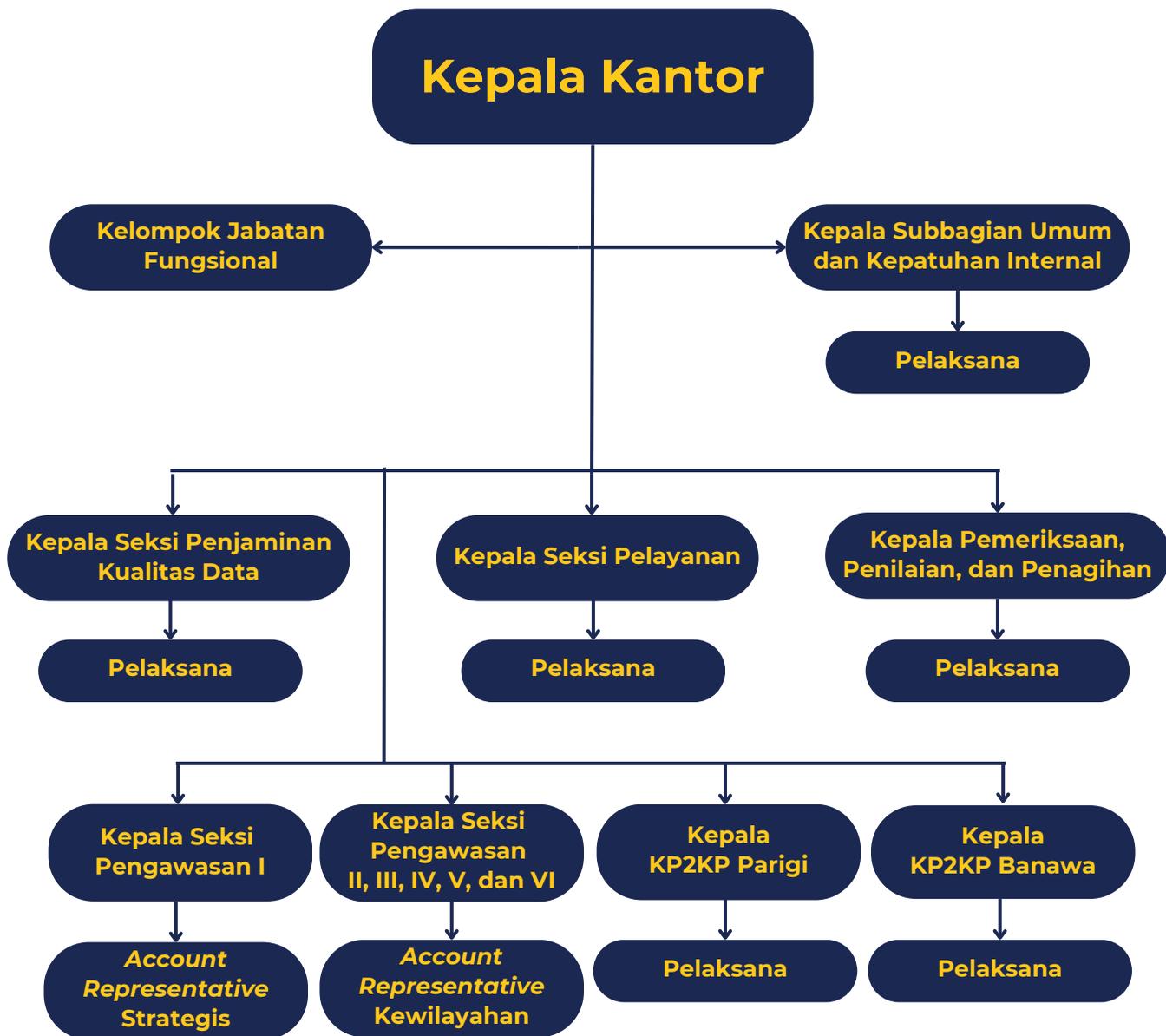
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **184/PMK.01/2020** tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-308/PJ/2024** tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. **analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak**
2. **penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional**
3. **edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak**
4. **pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak, dan pemberian Nomor Objek Pajak**
5. **pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
6. **penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat**
7. **pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra**
8. **pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak**
9. **penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan**
10. **pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela**
11. **analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional**
12. **penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal**
13. **produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan**
14. **penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan**
15. **pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko**
16. **pelaksanaan tugas kepatuhan internal**
17. **penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak**
18. **pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan**
19. **penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan**
20. **pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi**
21. **pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan**
22. **pelaksanaan kegiatan pengamatan**
23. **pelaksanaan administrasi kantor**



STRUKTUR ORGANISASI





STRUKTUR ORGANISASI

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan Fraud Risk Scenario, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan manajemen pengetahuan

Seksi Penjaminan Kualitas Data

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan

Seksi Pelayanan

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non -NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra , penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan



STRUKTUR ORGANISASI

Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan

selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengawasan II pada KPP Pratama Kelompok I juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan permohonan dan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama



PERAN STRATEGIS



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu yang berkedudukan di **Jalan Prof. Moh. Yamin No. 35, Palu** memiliki 4 (empat) wilayah kerja, yaitu

- 1 Kota Palu
- 2 Kab. Sigi
- 3 Kab. Donggala
- 4 Kab. Parigi Moutong

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu memiliki peran strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan **sosial, politik, dan ekonomi** yang telah berkembang dengan sangat cepat sehingga memunculkan paradigma baru di berbagai bidang yang sangat berbeda dengan paradigma lama.

Kondisi **eksternal** yang sangat strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1 Perkembangan **sosial, politik, dan ekonomi** yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi
- 2 Adanya bencana alam yang mempengaruhi **kondisi ekonomi** di Kota Palu dan sekitarnya
- 3 **Pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak** untuk membayar pajak masih rendah
- 4 Perkembangan **teknologi dan informasi** yang semakin pesat



SUMBER DAYA YANG DIMILIKI

Aspek Kepegawaian



Total Pegawai



*Data per 31 Desember 2024

Golongan	Jumlah
Golongan IV/b	1
Golongan IV/a	6
Golongan III/d	14
Golongan III/c	8
Golongan III/b	10
Golongan III/a	9
Golongan II/d	18
Golongan II/c	11
Golongan II/b	19
Total	96

Seksi/Subbag	Jumlah
Kepala Kantor	1
Subbagian Umum dan Ketaatan Internal	8
Seksi Penjaminan Kualitas dan Data	4
Seksi Pelayanan	17
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
Seksi Pengawasan I	10
Seksi Pengawasan II	7
Seksi Pengawasan III	7
Seksi Pengawasan IV	6
Seksi Pengawasan V	6
Seksi Pengawasan VI	7
Fungsional Pemeriksa	7
KP2KP Banawa	3
KP2KP Parigi	5
Total	96



SUMBER DAYA YANG DIMILIKI

Aspek Keuangan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu dalam kegiatannya dibiayai dari dana **APBN**, yaitu **DIPA Bagian Anggaran Rutin (BA15)** yang digunakan untuk kegiatan rutin kantor sesuai MAK yang tersedia.

Jumlah DIPA tahun anggaran 2024 sebesar **Rp8.519.492.000** dengan realisasi penggunaan untuk seluruh kegiatan tersebut sebesar **Rp8.466.152.151** yang dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (di bawah) Anggaran
Belanja Pegawai	Rp1.233.922.000	Rp1.232.166.000	Rp1.756.000
Belanja Barang	Rp6.968.396.000	Rp6.917.428.069	Rp50.967.931
Belanja Modal	Rp317.174.000	Rp316.558.082	Rp615.918
Total	Rp8.519.492.000	Rp8.466.152.151	Rp53.339.849



SUMBER DAYA YANG DIMILIKI

Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran tugas, sarana dan prasarana yang dimiliki Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu yaitu sebagai berikut:

Sarana dan Prasana Wajib Pajak

1. **Tempat Pelayanan** Terpadu
2. **TPT Helpdesk**
3. **TPT Loket** Prioritas
4. **Area Bermain** Anak
5. **Ruang** Laktasi
6. **Toilet Wajib** Pajak
7. **Ruang** Konseling
8. **Layanan** Mandiri
9. **Pantry Wajib** Pajak
10. **Musholla**
11. **Parkir Wajib** Pajak

Sarana Layanan Informasi

1. **Layar monitor** antrian
2. **Monitor informasi** perpajakan
3. **Baliho/spanduk/banner/brosur**
4. **Facebook page** :
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palu
5. **Instagram** : @pajakpalu
6. **Twitter** : @pajakpalu
7. **Youtube** :
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palu
8. **SMS Blast**

Sarana dan Prasana Pegawai

1. **Ruang Kepala** Kantor
2. **Ruang** Rapat
3. **Ruang Penyimpanan** Berkas
4. **Ruangan Kepala** SUKI
5. **Ruangan Kepala Seksi** PKD
6. **Ruangan Kepala Seksi** Pelayanan
7. **Ruangan Kepala Seksi** P3
8. **Ruangan Kepala Seksi** Was I
9. **Ruangan Kepala Seksi** Was II
10. **Ruangan Kepala Seksi** Was III
11. **Ruangan Kepala Seksi** Was IV
12. **Ruangan Kepala Seksi** Was V
13. **Ruangan Kepala Seksi** Was VI
14. **Ruangan Supervisor**
15. **Aula**
16. **Ruang** Inspirasi (Perpustakaan)
17. **Pantry** Pegawai
18. **Ruang** Studio
19. **Ruang** Spirit
20. **Ruang** Dokter
21. **Ruang Kerja** Pegawai
22. **Galeri** Prestasi
23. **Toilet** Pegawai
24. **Ruang** Server
25. **Loker** Pegawai
26. **Parkir** Mobil/Motor
27. **Arena** Olahraga
28. **Musholla**



SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu Tahun 2024 sebagai berikut:

1

BAB I PENDAHULUAN

2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

4

BAB IV PENUTUP

5

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis KPP Pratama Palu yang sudah ditetapkan di awal tahun 2024 dalam bentuk **PETA STRATEGI** yang disusun dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait di KPP Pratama Palu dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, sebagai langkah perencanaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan **tugas pokok dan fungsi dari KPP Pratama** adalah untuk **memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak Negara**. Hal ini sejalan dengan **Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pajak**.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”

Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Tujuan Direktorat Jenderal Pajak

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Penerimaan negara yang optimal, dan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.



VISI, MISI, DAN MOTO KPP PRATAMA PALU

Selain itu KPP Pratama Palu juga memiliki **Visi**, **Misi**, dan **Moto** yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuannya yaitu sebagai berikut.

Visi KPP Pratama Palu

Menjadi Institusi terdepan dalam menghimpun penerimaan Negara di Sulawesi Tengah yang bersinergi dengan para Mitra Pembangunan Bangsa melalui penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Berintegritas dalam rangka mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.

Misi KPP Pratama Palu

1. Mengimplementasikan regulasi perpajakan secara konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam wilayah kerja KPP Pratama Palu
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil
3. Turut serta secara aktif mendukung dan mengembangkan proses bisnis inti perpajakan berbasis digital
4. Mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan dan mitra pembangunan Bangsa baik secara lokal maupun Nasional
5. Mewujudkan aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi dalam menghimpun penerimaan Negara.

Moto KPP Pratama Palu

Mosintuvu Mokaraja, Mohasele Mosinggani
Kompak Bekerja, Berjaya Bersama



INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

Setelah penetapan rencana strategis, maka KPP Pratama Palu, maka dipandang perlu untuk menetapkan rencana secara lebih detail dalam bentuk **Perjanjian Kinerja** yang memuat beberapa hal: **Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Realisasi Kinerja** guna mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama yakni memberikan pelayanan atas pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku **KKO-One** dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Sasaran Strategis

1. **Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**
2. **Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**
3. **Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**
4. **Edukasi dan pelayanan yang efektif**
5. **Pengawasan pembayaran masa yang efektif**
6. **Pengujian kepatuhan material yang efektif**
7. **Penegakan hukum yang efektif**
8. **Data dan informasi yang berkualitas**
9. **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**
10. **Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Indikator Kinerja atas Sasaran Strategis

1. **Persentase realisasi penerimaan pajak**
2. **Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**
3. **Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**
4. **Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**
5. **Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**
6. **Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**
7. **Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**
8. **Persentase pengawasan pembayaran masa**
9. **Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**
10. **Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**
11. **Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**
12. **Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian**
13. **Tingkat efektivitas penagihan**
14. **Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**
15. **Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**
16. **Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**
17. **Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**
18. **Indeks Penilaian Integritas Unit**
19. **Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**
20. **Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Kode SS / IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	100%
6b-N	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
Nilai Kinerja Organisasi		

Kode SS / IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective		30%	101,48
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101,48
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,38%	100,38
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	102,98	102,98
	Customer Perspective		20%	101,74
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			103,41
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,40%	100,40
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	107,53%	107,53
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,06
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,06%	100,06
	Internal Process Perspective		25%	115,96
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,85
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	111,69%	111,69
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	120%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			110,84
6a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	120%	120
6b-N	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	95,53%	95,53
7	Penegakan hukum yang efektif			112,09
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	117,76%	117,76
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	108%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100
8	Data dan informasi yang berkualitas			120
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	87,56%	120
	Learning & Growth Perspective		25%	116,82
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,36
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,27	117,27
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96,36	113,36
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99,29	110,32
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
	Nilai Kinerja Organisasi			108,99



Selama tahun 2024, sepuluh sasaran strategis di atas sudah dilaksanakan secara maksimal dengan melaksanakan beberapa langkah-langkah:

1. **Melaksanakan pengawasan penerimaan rutin dan penggalian potensi pajak;**
2. **Melaksanakan Pelayanan Prima dan Terbaik;**
3. **Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan secara berkala sesuai rencana kerja;**
4. **Melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak potensial;**
5. **Melaksanakan intensifikasi melalui kegiatan tindak lanjut data dan penggalian potensi lainnya;**
6. **Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penilaian yang efektif;**
7. **Melaksanakan serangkaian tindakan penagihan aktif atas piutang pajak kepada Wajib Pajak;**
8. **Melaksanakan penyediaan dan produksi data, pengelolaan dokumen perpajakan secara tepat waktu;**
9. **Melaksanakan pengelolaan kinerja, kegiatan *In House Training*, dan *Internalisasi Corporate Value (ICV)* dengan efektif**
10. **Melaksanakan pengelolaan pelaksanaan anggaran dengan akuntabel**



EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

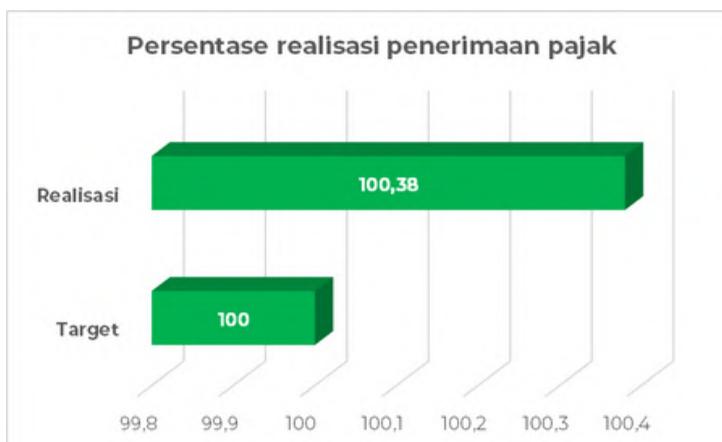
Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai **100,38** dari target **Rp2.415.660.275.000**. Pertumbuhan neto dalam tahun 2024 adalah sebesar **18,46%**. Capaian realisasi penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara tahun 2024 sebesar **100,61** dengan pertumbuhan neto sebesar **27,14%**. Posisi KPP Pratama Palu di urutan ke-7 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Adapun capaian nasional sebesar **100,46** dengan pertumbuhan neto **3,37%**. Urutan capaian KPP Pratama Palu menempati posisi **133** dari **370** KPP di Indonesia.



Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan pengawasan pembayaran masa tahun berjalan terhadap 100 Wajib Pajak Besar masing-masing *Account Representative*, melakukan pemutakhiran profil Wajib Pajak untuk mengetahui perkembangan usaha Wajib Pajak, pengawasan kewajiban perpajakan dengan menganalisis tren pembayaran, serta melakukan imbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan omzetnya dengan benar.





Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Capaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai **102,98** dari target. IKU ini merupakan IKU gabungan antara 2 (dua) komponen yaitu 50% dari pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 50% dari deviasi proyeksi perencanaan kas. Untuk komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar **115,96** dan untuk deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar **90** sehingga total realisasi indeksnya yaitu **102,98**. Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan pengawasan pembayaran WP strategis, melakukan pengawasan pembayaran rutin, menindaklanjuti segala data yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal.



Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu sebesar **Rp2.424.802.165.213** dengan target **Rp2.244.948.715.000** sehingga capaiannya sebesar **100,40** dari target. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yaitu melakukan koordinasi ke wilayah kerjanya, melakukan penelitian data internal dan eksternal terhadap Wajib Pajak, melakukan penerbitan SP2DK, mengoptimalkan kinerja pegawai yang berhubungan dengan penerimaan dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas), melakukan asistensi dan konsultasi dengan Wajib Pajak, serta menerbitkan Surat Imbauan untuk Wajib Pajak.





Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Capaian persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai **107,53** dari target. Jumlah SPT Tahunan 2024 **401.610** SPT dan Wajib SPT yaitu sebesar **83.468** Wajib Pajak. Kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan membuat Surat Imbauan SPT, *Whatsapp* Blast WP OPNK dan Penyisiran WP OPNK, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, menyelenggarakan Pojok Pajak, asistensi Pengisian SPT Tahunan, dan melakukan penyuluhan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi



Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yaitu sebesar **Rp170.805.807.946** dengan target **Rp170.711.560.000** sehingga capaiannya sebesar **100,06** dari target. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yaitu melakukan koordinasi ke wilayah kerjanya, melakukan penelitian data internal dan eksternal terhadap Wajib Pajak, melakukan penerbitan SP2DK, mengoptimalkan kinerja pegawai yang berhubungan dengan penerimaan dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas), melakukan asistensi dan konsultasi dengan Wajib Pajak, serta menerbitkan Surat Imbauan untuk Wajib Pajak.

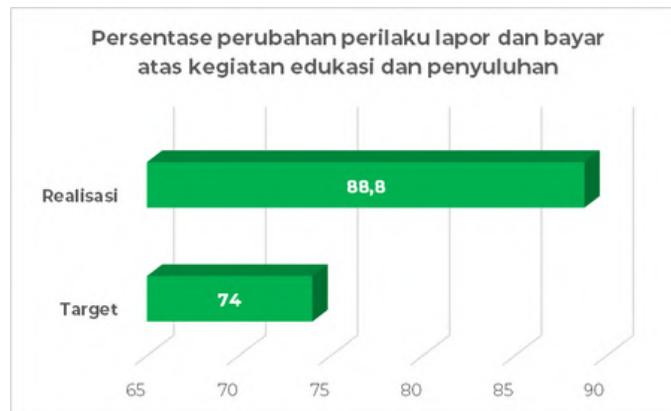




Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

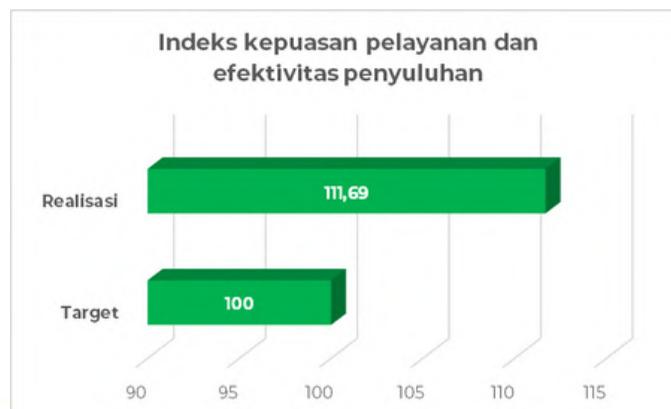
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan gabungan dari **KPP Pratama Palu**, **KP2KP Banawa**, dan **KP2KP Parigi** dengan realisasi yaitu sebesar **88,80%** dari target sebesar **74%** sehingga capaiannya sebesar **120**. Hal-hal yang telah dilaksanakan yaitu mengidentifikasi data profil, pembayaran, pelaporan perpajakan, dan data pendukung lainnya bagi Wajib Pajak DSPT, menyusun jadwal visit untuk beberapa data SPT, melakukan komunikasi yang intensif dengan Wajib Pajak DSPT yang ditemukan saat visit ke lokasi yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, mengadakan kelas pajak secara *online* dan/atau *offline*, identifikasi alamat Wajib Pajak DSPT, serta melakukan perekaman tindak lanjut data DSPT pada aplikasi sisuluh.



Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

KPP Pratama Palu memperoleh nilai **111,69** dari target sebesar **100** atas hasil survei yang telah dilakukan kepada beberapa Wajib Pajak sebagai responden indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan yang terdaftar di KPP Pratama Palu sehingga capaiannya sebesar **111,69**. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan (*monitoring*) terkait survei yang dilakukan tersebut. Selain itu, KPP Pratama Palu akan selalu meningkatkan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penyuluhan dan pelayanan yang terbaik bagi para Wajib Pajak.

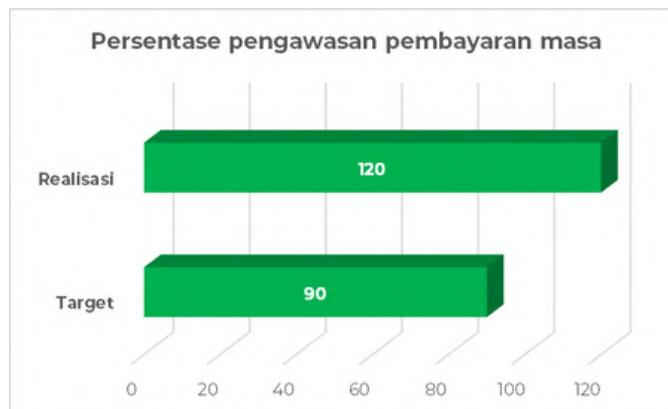




Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase pengawasan pembayaran masa

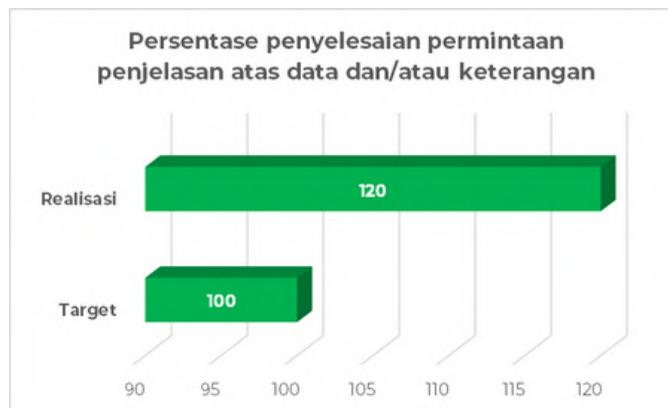
Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa yaitu sebesar **120%** dari target sebesar **90%** sehingga capaiannya yaitu **120**. Capaian IKU ini merupakan gabungan dari capaian PPM strategis dan kewilayahan. Variabel dari realisasi strategis terdiri atas dafnom STP, data perpajakan dinamisasi PPh Pasal 25, sedangkan variabel dari realisasi kewilayahan yaitu dafnom STP, data perpajakan, dan penambahan Waji Pajak. Adapun hal-hal yang telah dilakukan yaitu menghubungi Wajib Pajak untuk mengingatkan melakukan pembayaran masa dan menindaklanjuti semua data yang disediakan.



Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian kepatuhan material yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

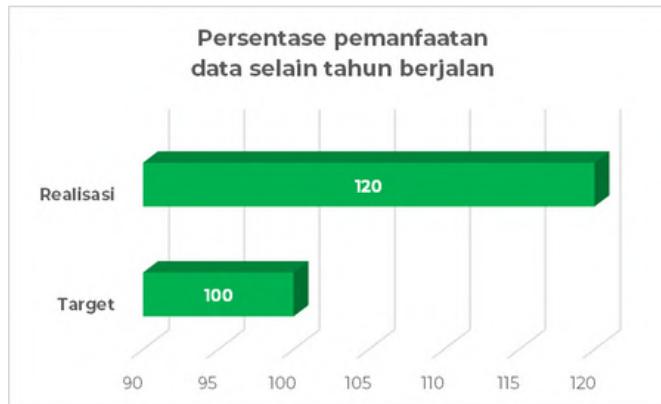
KPP Pratama Palu berhasil memperoleh realisasi sebesar **120%** dari target **100%** sehingga capaiannya yaitu sebesar **120**. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu melakukan analisis serta menindaklanjuti data yang tersedia baik data internal maupun eskternal, menerbitkan SP2DK, melakukan asistensi dan konsultasi dengan Wajib Pajak, menerbitkan Surat Imbauan untuk Wajib Pajak, serta menerbitkan surat untuk meminta penjelasan atau klarifikasi atas data atau keterangan yang dimiliki oleh AR.





Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan yaitu sebesar **120%** dari target **100%** sehingga capaiannya yaitu **120**. Komponen dari penilaian IKU ini yaitu berasal dari pemanfaatan data STP dan data *matching*. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan menerbitkan STP bagi Wajib Pajak serta menggunakan data pemicu yang tersedia untuk menggali potensi penerimaan dari Wajib Pajak.



Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu yaitu sebesar 95,53% dari target **100%** sehingga capaiannya yaitu **95,53**. Komponen dari penilaian IKU ini yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (30%), kualitas pelaksanaan komite kepatuhan (40%), dan persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (30%). Untuk laporan pelaksanaan tugas telah tercapai **120%**, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan tercapai **110,6%**, dan persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan tercapai **50,59%**

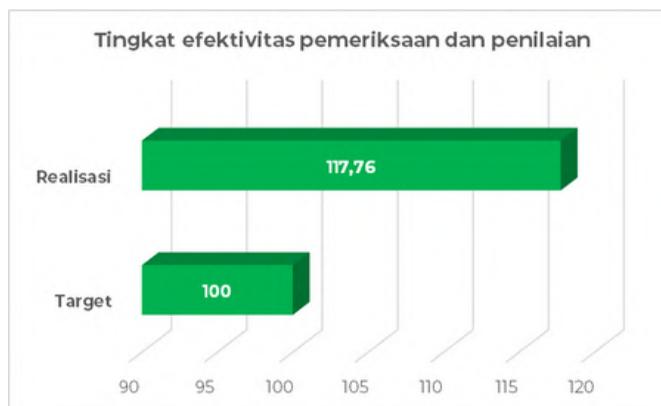




Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif

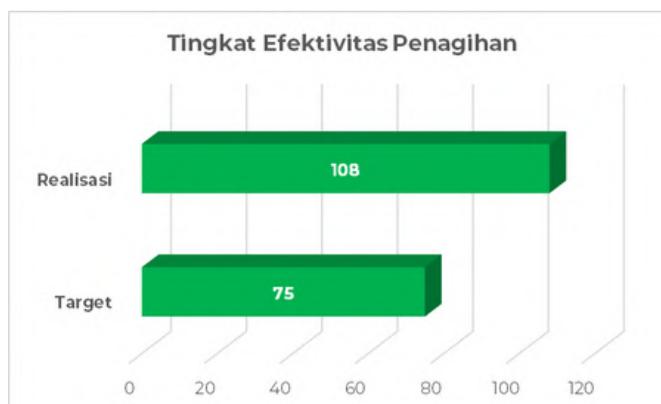
Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 di KPP Pratama Palu yaitu sebesar **117,76%** dengan target **100%** sehingga capaiannya **117,76**. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yaitu melakukan monitoring pembayaran dan pelunasan atas ketetapan yang telah diterbitkan, monitoring seluruh pemeriksaan yang sedang berjalan, serta melakukan komunikasi persuasif kepada Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan, dan melakukan monitoring penyelesaian penilaian tepat waktu.



Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Tingkat efektivitas penagihan

Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 di KPP Pratama Palu yaitu sebesar **108%** dengan target **75%** sehingga capaiannya telah tercapai **120**. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yaitu melakukan tindakan penagihan secara persuasif baik melalui penagihan aktif dan pasif kepada Wajib Pajak dan menghubungi Wajib Pajak via telepon terlebih dahulu untuk memastikan keadaan Wajib Pajak.





Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

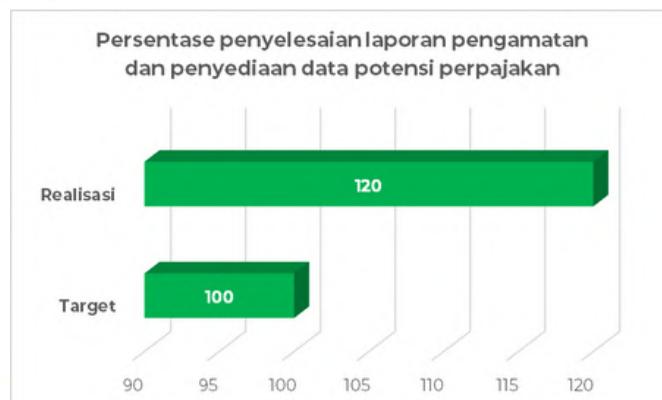
Realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2024 di KPP Pratama Palu yaitu sebesar **100%** dengan target **100%** sehingga capaiannya **100**. KPP Pratama Palu pada tahun 2024 menyampaikan **3 (tiga)** usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang mana hanya 1 (satu) di antaranya disetujui oleh Kantor Wilayah. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak **1 (satu)** usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sehingga capaian KPP Pratama Palu yaitu **100**.



Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan informasi yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

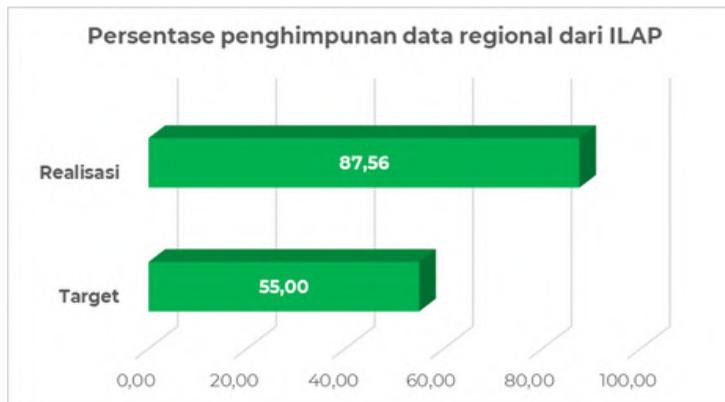
Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakanyaitu sebesar **120%** dari target sebesar **100%** sehingga capaiannya telah mencapai **120**. Capaian IKU ini merupakan gabungan dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) dan laporan pengamatan. .KPD L sendiri telah memperoleh realisasi sebesar 114,78% dengan target 100%, sedangkan untuk laporan pengamatan KPP Pratama Palu memperoleh realisasi 275%. Realisasi dari IKU ini adalah gabungan dari 2 kegiatan di atas dengan realisasi sebesar 120%. Adapun hal-hal yang telah dilakukan yaitu dengan menyusun Data Alket yang bersumber dari internal maupun eksternal.





Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

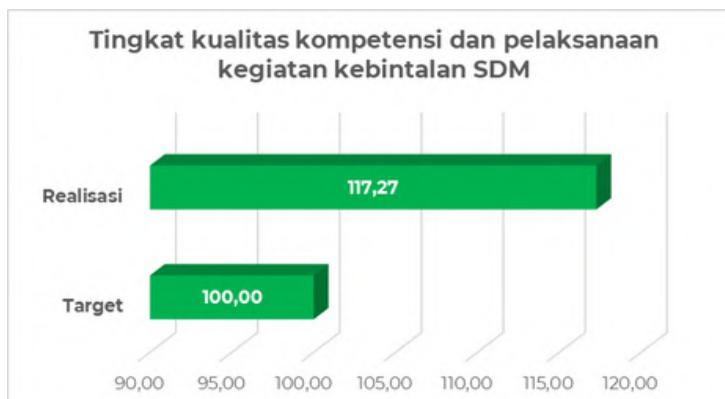
Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP yaitu sebesar **87,56%** dari target **55%** sehingga capaiannya telah mencapai **120**. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga terkait dengan data yang telah diturunkan sesuai dengan format dari Kantor Pusat.



Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

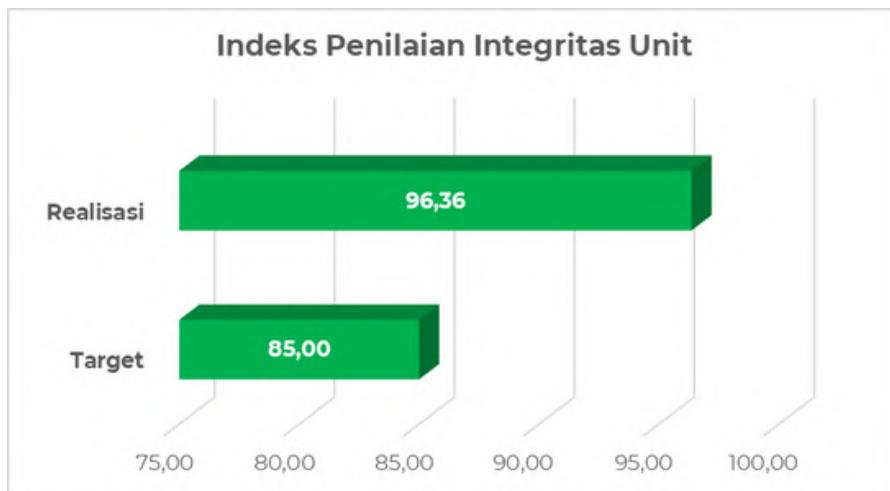
Realisasi tingkat kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yaitu sebesar **117,27** dari target **100** sehingga capaiannya telah mencapai **120**. Realisasi tersebut berdasarkan gabungan dari 2 komponen. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi) yaitu nilai dari rekapitulasi laporan hasil Assessment Center dan Laporan Individual Assessment Center, hasil uji kompetensi teknis dan laporan realisasi pengembangan kompetensi, Laporan pelaksanaan pelatihan pegawai/IHT, studiA DJP, SIKKA dan Kemenkeu Learning Centern SDM. Kompetensi 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM) yaitu Hasil Feedback, Laporan Kegiatan.





Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks penilaian integritas unit KPP Pratama Palu tahun 2024 yaitu sebesar **96,36** dari target **85** sehingga capaiannya yaitu sebesar **113,36**. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu melakukan monitoring kepada Wajib Pajak yang menjadi responden untuk mengisi Survei Penilaian Integritas Unit.



Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Realisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yaitu sebesar **99,29** dengan target **90** sehingga capaiannya yaitu sebesar **110,32**. Dialog Kinerja Risiko Organisasi (DKRO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

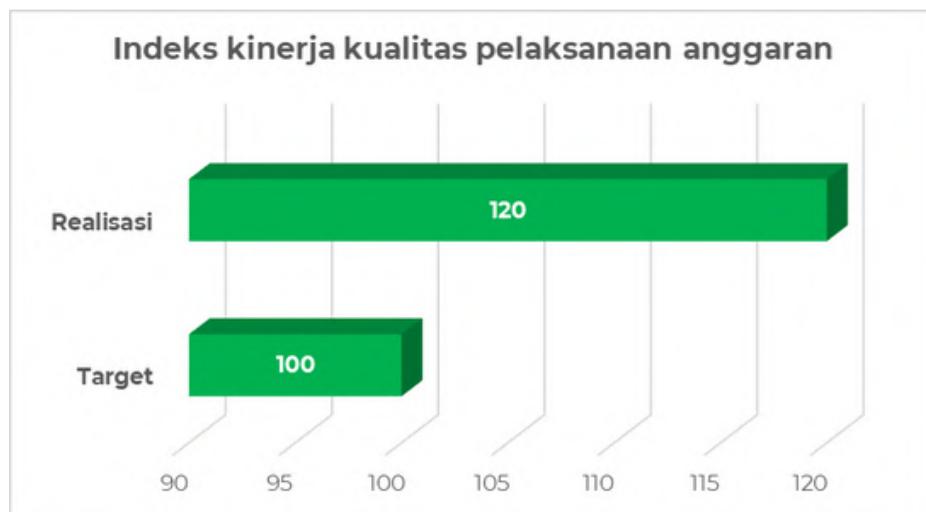




Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Palu yaitu sebesar **120** dengan target **100** sehingga capaiannya **120**. Indeks tersebut berasal dari dua komponen yaitu SMART yang bersumber dari aplikasi SMART-DJA dengan nilai 100 dan IKPA dengan nilai 98,83 yang bersumber dari aplikasi OM-SPAN. Hal yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah mengelola anggaran seefisien dan seefektif mungkin sehingga pencapaian selain konsistensi dapat terealisasi dengan nilai tinggi pada penyerapan, efisiensi, pencapaian keluaran riil, dan indikator pelaksanaan anggaran dari DJPb.





KINERJA LAINNYA

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang telah kami paparkan di atas, KPP Pratama Palu juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti:

1. **pelayanan pajak;**
2. **penyuluhan pajak;**
3. **pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;**
4. **pemutakhiran data Wajib Pajak sesuai SE-11/PJ/2019;**
5. **penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;**
6. **pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;**
7. **pelaksanaan konsultasi perpajakan;**
8. **pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;**
9. **pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;**
10. **pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;**
11. **pemeriksaan pajak;**
12. **penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;**
13. **penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;**
14. **penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;**
15. **penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;**
16. **pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;**
17. **pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;**
18. **pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;**
19. **pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan**
20. **pelaksanaan administrasi kantor antara lain: administrasi kepegawaian, penatausahaan BMN, surat menyurat, pengelolaan keuangan;**
21. **pelaksanaan kerja sama dengan kantor kelurahan guna meningkatkan kepatuhan dengan membuka Pojok Pajak di setiap kelurahan secara bergantian selama satu minggu;**
22. **pelaksanaan Progam *Visit and Tax Sevices Progam* dengan melakukan penyisiran di setiap kelurahan di Wilayah Kerja KPP Pratama Palu yang merupakan pusat ekonomi.**



Usaha-usaha dalam pencapaian tujuan telah dilaksanakan, akan tetapi terdapat kendala-kendala yang menyebabkan beberapa sasaran strategis tidak terealisasi secara optimal. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya;**
- 2. Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat dan belum diiringi adanya dukungan data yang cukup memadai untuk penggalan potensi pajak;**
- 3. Teknologi informasi yang dikembangkan oleh DJP belum sepenuhnya dimanfaatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT;**
- 4. Melayani dan mengawasi Wajib Pajak memerlukan kualitas dan kuantitas SDM yang lebih baik.**

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang terjadi dan menghambat pencapaian sasaran kinerja, kami melakukan langkah-langkah yaitu:

- 1. Mengoptimalkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dengan memanfaatkan sarana dan SDM internal KPP maupun saluran-saluran informasi massa;**
- 2. Mengirimkan SMS blast dan e-mail blast kepada para WP OPNK dan WP Badan yang belum melakukan pelaporan dan penyetoran dengan benar;**
- 3. Memberikan pelayanan dengan sarana pendukung yang lebih representatif untuk meningkatkan kesadaran dan kenyamanan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya;**
- 4. Melakukan pengumpulan, pemanfaatan, dan validasi data secara akurat dalam penggalan potensi untuk mendorong kepercayaan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak;**
- 5. Proses administrasi yang menggunakan komputer untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja;**
- 6. Pemanfaatan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien;**
- 7. Melakukan pembenahan Master File Wajib Pajak dalam rangka perbaikan administrasi Wajib Pajak terdaftar.**

Sedangkan langkah-langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah:

- 1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja yang secara efektif mendorong seluruh komponen organisasi untuk bekerja optimal dalam pencapaian tujuan;**
- 2. Melakukan pengawasan Wajib Pajak yang mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan penggalan potensi secara optimal;**
- 3. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan bimbingan atas pencapaian target kinerja seluruh pegawai secara periodik;**
- 4. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau In House Training untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai.**



REALISASI ANGGARAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu mengelola Pengelolaan DIPA 2024 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dikelola sesuai dengan aturan-aturan keuangan yang berlaku dan menurut daftar alokasi yang ada. Sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat sisa anggaran dari DIPA BA-15.

Jumlah DIPA tahun anggaran 2024 sebesar **Rp8.519.492.000** dengan realisasi penggunaan untuk seluruh kegiatan tersebut sebesar **Rp8.466.152.151** yang dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (di bawah) Anggaran
Belanja Pegawai	Rp1.233.922.000	Rp1.232.166.000	Rp1.756.000
Belanja Barang	Rp6.968.396.000	Rp6.917.428.069	Rp50.967.931
Belanja Modal	Rp317.174.000	Rp316.558.082	Rp615.918
Total	Rp8.519.492.000	Rp8.466.152.151	Rp53.339.849



BAB IV

PENUTUP





Berdasarkan data-data yang telah kami sampaikan di atas, secara umum tingkat pencapaian **rencana strategis** dan **sasaran strategis** terhadap realisasinya sudah mencapai target yang ditentukan. Hal ini didukung dengan kerja keras semua pegawai KPP Pratama Palu dan pihak-pihak yang terkait dalam mencapai rencana strategis dan sasaran strategis tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPP Pratama Palu menghadapi beberapa kendala antara lain kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melayani. Untuk itu diharapkan tahun-tahun selanjutnya agar dapat ditingkatkan adanya penyediaan layanan informasi massa yang cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dan pembayaran pajak. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM yang memadai akan menunjang pelaksanaan tugas seiring dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang dilayani dan diawasi setiap tahunnya.

Terbaik Pertama kategori KPP Pratama dalam Penyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Audited

Pada **9 September 2024**, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu meraih prestasi Terbaik Pertama kategori KPP Pratama dalam Penyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Audited. Pencapaian dalam pembuatan laporan keuangan ini tidak lepas dari hasil sinergi yang telah dilakukan antara Tim Pengelola Keuangan KPP Pratama Palu dengan berbagai pihak. Kepala KPP Pratama Palu menyampaikan kepada Tim Pengelola Keuangan agar tetap menjaga kualitas laporan keuangan tahun-tahun berikutnya yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.





Tax Gathering KPP Pratama Palu Tahun 2024 “Sambut Perubahan Wujudkan Kesempurnaan”

Pada **17 Juli 2024**, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu melaksanakan kegiatan *Tax Gathering*. *Tax Gathering* adalah pemberian apresiasi dan *treatment* pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pemberian penghargaan kepada para Wajib Pajak atas kepatuhan perpajakan tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di **Hotel Best Western Coco Palu**.





Team Building Internalisasi Corporate Value (ICV) Tahun 2024 "Sinergi Untuk Integritas, Bangun Indonesia Berkualitas"

Pada **17 Agustus 2024**, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu melaksanakan kegiatan Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Kegiatan *Team Building* KPP Pratama Palu Tahun 2024. *Team Building* merupakan salah satu subprogram dari program ICV yang bernama DJP Vibes. Program *Team Building* ini memiliki tujuan untuk memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; memiliki wawasan kebangsaan, menangkal paham radikal; menumbuhkan rasa cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); membangun kesadaran pentingnya dalam hal bela Negara; menguatkan mental pegawai. Kegiatan tersebut dilaksanakan di **Bukit Indah Doda** setelah melaksanakan upacara bendera.





Terbaik Pertama Kelompok Kementerian pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat “Pelayanan Prima”

Pada **8 Oktober 2024**, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu memperoleh Penghargaan sebagai Terbaik Pertama Kelompok Kementerian pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat “Pelayanan Prima”. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Heru Pambudi, yang kemudian diserahkan kepada Kepala KPP Pratama Palu, Mulyana, pada acara penganugerahan tersebut di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari hasil sinergi yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Palu. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu. Kepala KPP Pratama Palu menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pegawai sehingga KPP Pratama Palu dapat memperoleh penghargaan tersebut.





Juara Umum Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78 Lingkup Kementerian Keuangan RI Provinsi Sulawesi Tengah

Pada **30 Oktober 2024**, tidak hanya dalam bidang perpajakan saja, KPP Pratama Palu juga berhasil mempertahankan predikat Juara Umum Lomba Cabang Olahraga Lingkup Kementerian Keuangan RI Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangkaian acara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78. Kemenangan tersebut merupakan keempat kalinya KPP Pratama Palu memperoleh Juara Umum HORI sejak tahun 2021 s.d. 2024. Keterlibatan dan antusiasme seluruh pegawai termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sangat terlihat jelas dalam mengikuti pertandingan tersebut. Kepala KPP Pratama Palu selalu menanamkan pola pikir kepada seluruh pegawai untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan karena menang atau kalah adalah hal yang biasa. Hal terpenting dalam sebuah pertandingan adalah seluruh pegawai telah mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan yang terbaik.





Double Hatrick Capaian Penerimaan Pajak KPP Pratama Palu di atas 100%

Pada **31 Desember 2024**, KPP Pratama Palu kembali menorehkan prestasi dengan tercapainya penerimaan pajak di atas 100% untuk keenam kalinya atau kita menyebutnya dengan **Double Hatrick 100%**. KPP Pratama Palu telah memperoleh capaian di atas 100% ini sejak tahun 2019 sampai dengan 2024. Kepala KPP Pratama Palu mengucapkan terima kasih karena pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pegawai KPP Pratama Palu dengan dukungan dari para Wajib Pajak yang telah berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Palu memiliki harapan agar penerimaan tahun 2025 juga dapat memperoleh capaian di atas 100% sehingga dapat memperoleh predikat tujuh kali 100% penerimaan.





LAMPIRAN



KANTOR PAJAK www.pajak.go.id



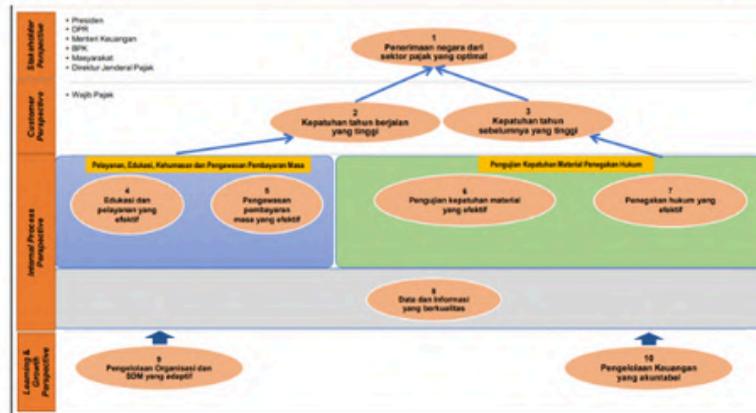
PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA NOMOR : PK-50/MP.J.16/2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan 'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan'.





PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA,
TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%





PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 2,281,910,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1,007,178,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 561,840,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 712,892,000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 6,186,800,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4,952,878,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1,233,922,000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan
Maluku Utara

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Mahmudin Zuhri



Ditandatangani Secara Elektronik
Mulyana





PERJANJIAN KINERJA

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA,
TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/KU	SS dan KU	Target						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak		14,18%	14,18%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		15,24%	15,24%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		13,99%	13,99%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa		90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							





PERJANJIAN KINERJA

Kode SS/KU	SS dan KU	Target						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit						85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu,



Ditandatangani Secara Elektronik
Mulyana

